

ANALISIS FISKAL

(APBN, APBD, APBDes)

Oleh
Bambang Juanda
<https://bambangjuanda.com/>



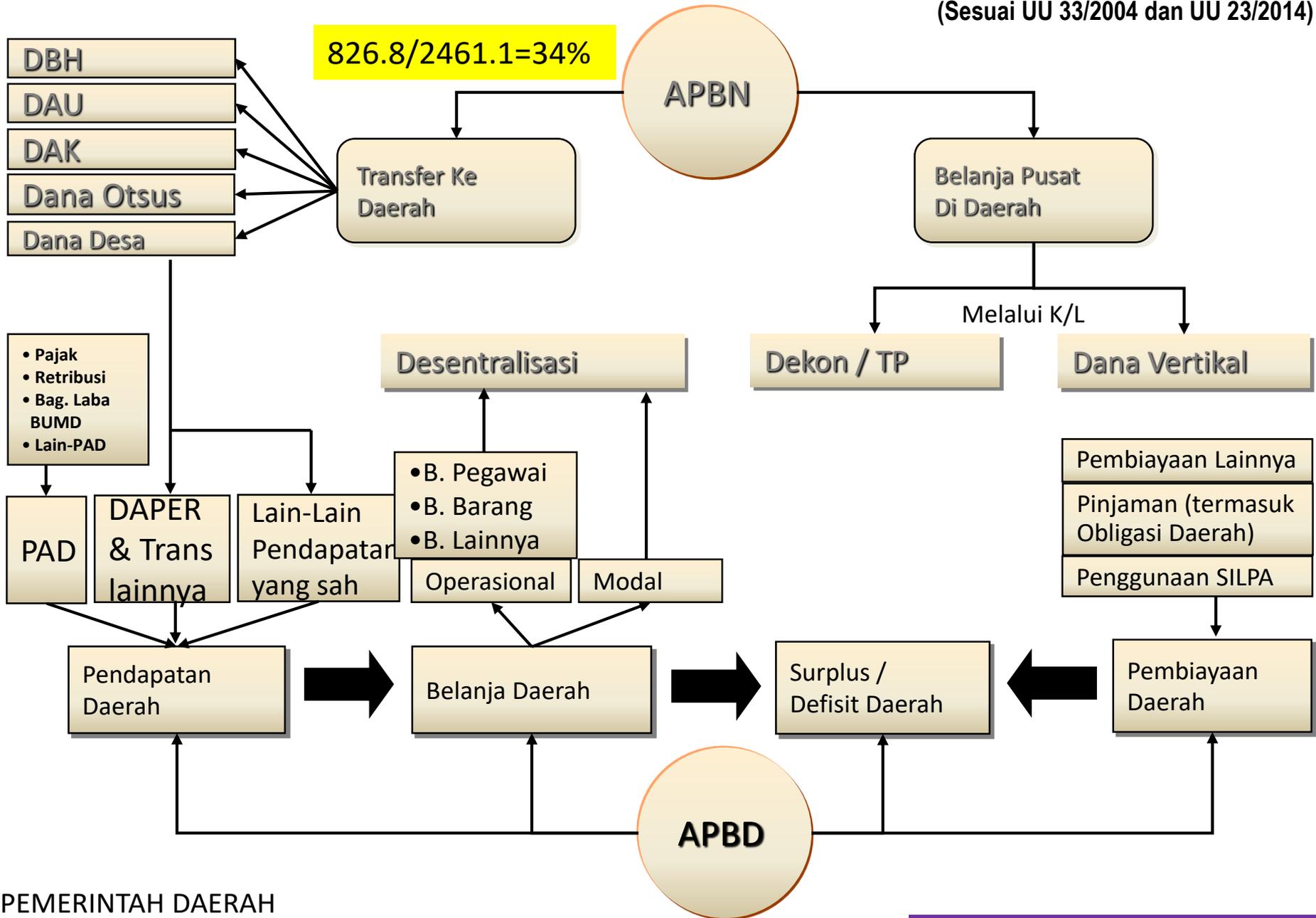
External pressures also reflected in several budget items.. However overall budget performance remains healthy due to prudent fiscal management..



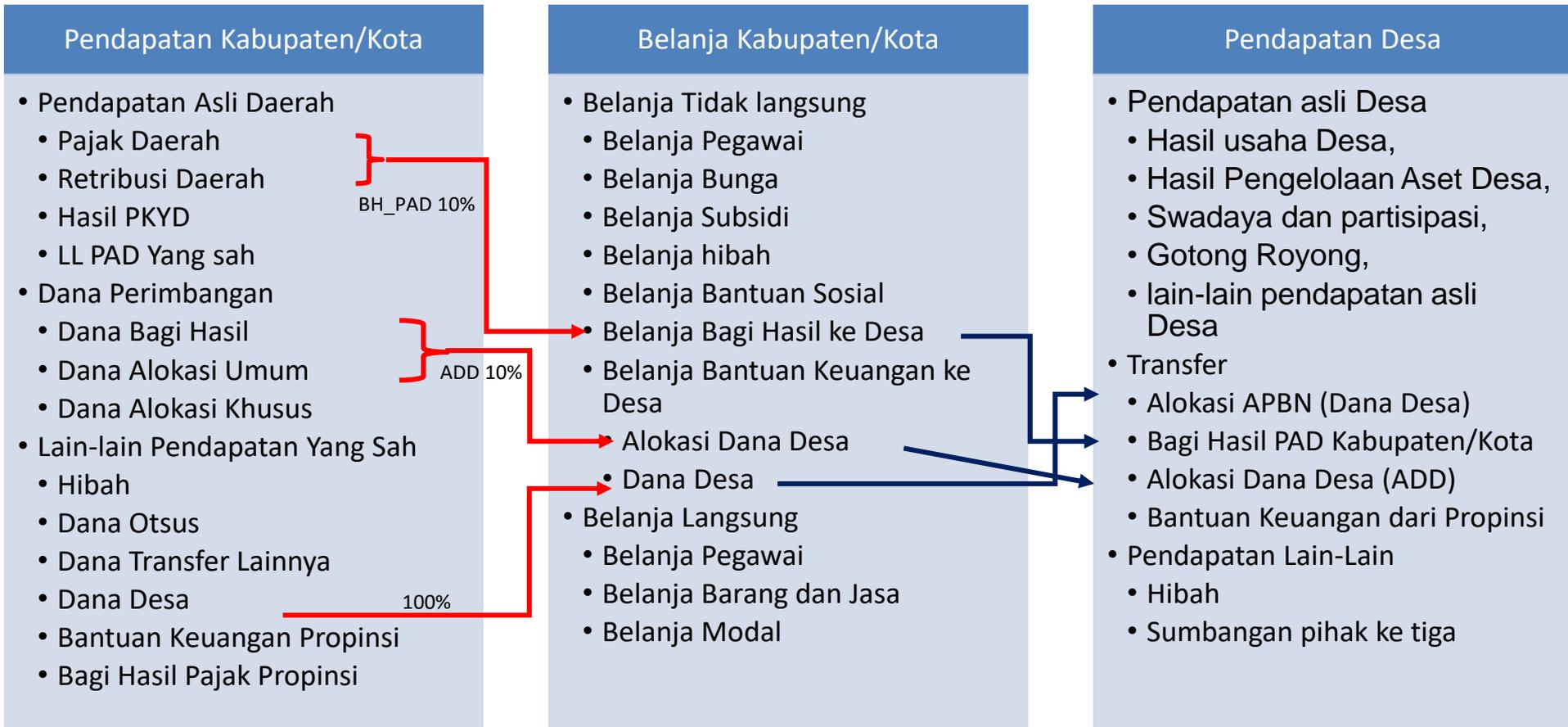
ITEMS (IDR TRILLION)	2018					2019				
	Budget	1 st Half Real.	Growth (%)	Full Year Audited	% of Budget	Budget	1 st Half Real.	Growth (%)	Full Year Outlook	% of Budget
A. STATE REVENUE	1,894.7	833.4	16.0	1,943.7	102.6	2,165.1	898.8	7.8	2,030.8	93.8
I. DOMESTIC REVENUE	1,893.5	830.3	15.6	1,928.1	101.8	2,164.7	898.0	8.2	2,029.4	93.8
1. TAX REVENUE	1,618.1	653.5	14.3	1,518.8	93.9	1,786.4	688.9	5.4	1,643.1	92.0
<i>TAX RATIO (%)</i>	<i>11.6</i>	<i>4.9</i>		<i>11.4</i>		<i>12.2</i>	<i>4.7</i>		<i>11.1</i>	
2. NON TAX REVENUE	275.4	176.8	21.0	409.3	148.6	378.3	209.1	18.2	386.3	102.1
II. GRANT	1.2	3.1	1,363.8	15.6	1,300.5	0.4	0.7	(76.5)	1.3	307.8
B. STATE EXPENDITURE	2,220.7	944.0	5.7	2,213.1	99.7	2,461.1	1,034.5	9.6	2,341.6	95.1
I. CENTRAL GOVT EXPENDITURE	1,454.5	558.4	12.0	1,455.3	100.1	1,634.3	630.6	12.9	1,527.2	93.4
1. LINE MINISTRIES EXPENDITURE	847.4	296.0	12.1	846.6	99.9	855.4	342.3	15.7	854.9	99.9
2. NON LINE MINISTRIES EXPENDITURE	607.1	262.4	11.9	608.8	100.3	778.9	288.2	9.8	672.2	86.3
II. TRANSFER TO REGION AND VILLAGE FUND	766.2	385.6	(2.3)	757.8	98.9	826.8	403.9	4.8	814.5	98.5
1. TRANSFER TO REGION	706.2	349.7	(3.0)	697.9	98.8	756.8	362.1	3.5	744.6	98.4
2. VILLAGE FUND	60.0	35.9	-	59.9	99.8	70.0	41.8	-	69.9	99.9
C. PRIMARY BALANCE	(87.3)	10.0	(114.7)	(11.5)	13.2	(20.1)	(1.0)	(109.7)	(34.8)	172.9
D. BUDGET SURPLUS/(DEFICIT) (A-B)	(325.9)	(110.6)	(36.8)	(296.4)	82.7	(296.0)	(135.8)	22.8	(310.9)	105.0
<i>% BUDGET SURPLUS/(DEFICIT) TO GDP</i>	<i>(2.19)</i>	<i>(0.74)</i>		<i>(1.82)</i>		<i>(1.84)</i>	<i>(0.84)</i>		<i>(1.93)</i>	
E. FINANCING	325.9	176.2	(15.8)	305.7	93.8	296.0	175.3	(0.5)	310.9	105.0
OF WHICH: DEBT FINANCING	399.2	176.0		372.0	93.2	359.3	180.5		373.9	104.1
OF WHICH: GOVT SECURITIES (SBN) ISSUANCE		192.6		358.4	86.5	389.0	195.7		381.9	98.2
SURPLUS/(DEFICIT) FINANCING		65.7		36.2		(0.0)	39.6		0.0	

Postur Realisasi APBN s.d. 31 Agustus 2018

APBN (triliun Rupiah)	2016				2017				2018			
	APBNP	Realisasi s.d. 31 Agustus	% thd APBNP	Growth (%)	APBNP	Realisasi s.d. 31 Agustus	% thd APBNP	Growth (%)	APBN	Realisasi s.d. 31 Agustus	% thd APBN	Growth (%)
A. PENDAPATAN NEGARA	1.786,2	873,5	48,9	0,7	1.736,1	973,4	56,1	11,4	1.894,7	1.152,7	60,8	18,4
I. PENDAPATAN DALAM NEGERI	1.784,2	872,3	48,9	0,6	1.733,0	972,0	56,1	11,4	1.893,5	1.147,8	60,6	18,1
1. PENERIMAAN PERPAJAKAN	1.539,2	711,4	46,2	1,8	1.472,7	778,7	52,9	9,5	1.618,1	907,5	56,1	16,5
a. PENDAPATAN DJP (include PPh migas)	1.355,2	622,8	46,0	4,1	1.283,6	686,1	53,5	10,2	1.424,0	799,5	56,1	16,5
b. PENDAPATAN DJBC	184,0	88,6	48,2	(11,9)	189,1	92,6	49,0	4,5	194,1	108,1	55,7	16,7
2. PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	245,1	160,9	65,6	(4,3)	260,2	193,3	74,3	20,2	275,4	240,2	87,2	24,3
II. PENERIMAAN HIBAH	2,0	1,2	61,6	92,2	3,1	1,3	42,9	9,5	1,2	5,0	416,6	274,3
B. BELANJA NEGARA	2.082,9	1.135,0	54,5	7,7	2.133,3	1.198,3	56,2	5,6	2.220,7	1.303,5	58,7	8,8
I. BELANJA PEMERINTAH PUSAT	1.306,7	644,7	49,3	3,8	1.367,0	695,7	50,9	7,9	1.454,5	802,2	55,2	15,3
1. Belanja K/L	767,8	364,5	47,5	13,7	798,6	392,2	49,1	7,6	847,4	441,8	52,1	12,7
2. Belanja Non K/L	538,9	280,2	52,0	(6,8)	568,4	303,5	53,4	8,3	607,1	360,3	59,4	18,7
II. TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA	776,3	490,3	63,2	13,2	766,3	502,6	65,6	2,5	766,2	501,3	65,4	(0,3)
1. Transfer ke Daerah	729,3	459,9	63,1	10,4	706,3	466,1	66,0	1,3	706,2	465,1	65,9	(0,2)
2. Dana Desa	47,0	30,4	64,7	0,0	60,0	36,5	60,9	0,0	60,0	36,2	60,4	0,0
C. KESEIMBANGAN PRIMER	(105,5)	(145,5)	137,9	63,0	(178,0)	(84,0)	47,2	(42,3)	(87,3)	11,5	(13,2)	(113,7)
D. SURPLUS/ (DEFISIT) ANGGARAN (A - B)	(296,7)	(261,5)	88,1	40,1	(397,2)	(224,9)	56,6	(14,0)	(325,9)	(150,7)	46,2	(33,0)
<i>% Surplus/ (Defisit) Anggaran terhadap PDB</i>	(2,35)	(2,06)			(2,92)	(1,65)			(2,19)	(1,02)		
E. PEMBIAYAAN ANGGARAN	296,7	340,8	114,8	34,4	397,2	338,9	85,3	(0,6)	325,9	265,5	81,5	(21,7)
a.I. PEMBIAYAAN UTANG	371,6	345,5	93,0	31,3	461,3	336,6	73,0	(2,6)	399,2	274,1	68,7	(18,6)
a.I - Surat Berharga Negara (neto)	364,9	357,0	97,8	26,3	467,3	347,6	74,4	(2,6)	414,5	270,5	65,2	(22,2)
KELEBIHAN/(KEKURANGAN) PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,0	79,3			0,0	114,0			0,0	114,7		



Hubungan Keuangan Kabupaten/Kota dan Desa



PMK Nomor 257/PMK.07/2015: TATA CARA PENUNDAAN DAN/ATAU PEMOTONGAN DANA PERIMBANGAN TERHADAP DAERAH YANG TIDAK MEMENUHI ALOKASI DANA DESA (ADD)

Dlm penyusunan APBN, “belum” ada acuan dlm hal:

1. bagaimana **besaran alokasi untuk belanja** kementerian/lembaga (**K/L**), belanja non K/L serta belanja transfer ke daerah dan desa;
2. bagaimana besaran alokasi untuk belanja K/L terkait **urusan wajib pelayanan dasar** (SPM) dan selain urusan wajib pelayanan dasar;
3. bagaimana besaran alokasi menurut **jenis belanja** pegawai, barang, modal, subsidi, hibah, bantuan sosial dan lainnya;
4. Jenis **dana transfer mana** yang perlu ditingkatkan (prioritaskan) atau dikurangi;
5. Bagaimana menentukan target pendapatan dari penerimaan perpajakan dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP);
6. Jika total belanja yang dianggarkan melebihi target penerimaan (defisit), jenis sumber pembiayaan apa yang akan dilakukan;
7. Apakah **Utang Indonesia** selama ini telah **mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas**.

Tujuan Kajian:

1. Mengkaji definisi APBN berkualitas.
2. Mengkaji aspek apa saja yang dikaji dalam APBN berkualitas.
3. Mengkaji ukuran atau cara mengukur APBN berkualitas.
4. Memberikan rekomendasi dan upaya yang harus dilakukan agar pengelolaan keuangan negara dapat memberikan dampak yang baik bagi terwujudnya APBN berkualitas?

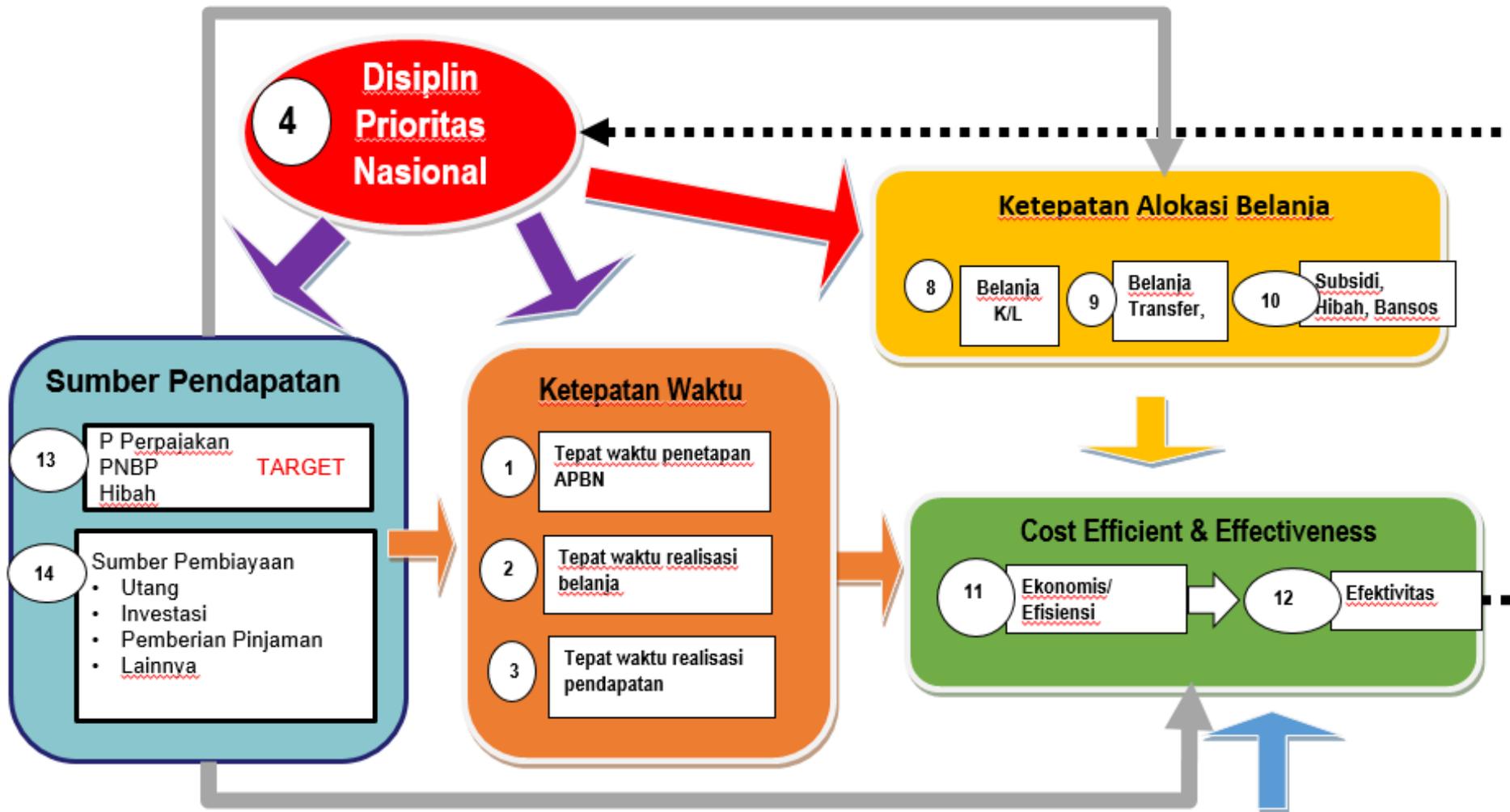
Pengembangan Definisi APBN Berkualitas

- **Belum ada definisi APBN berkualitas** yg ringkas & jelas.
- **Pemerintah mendorong belanja yang lebih berkualitas, atau *spending better*.** Hal ini dilaksanakan melalui penghematan belanja barang secara masif, **penguatan belanja modal, reformasi belanja pegawai**, peningkatan efektivitas termasuk **ketepatan sasaran belanja bantuan sosial dan subsidi, serta penguatan belanja transfer ke daerah dan dana desa.**
- Juanda *et al* (2014): ***Belanja Berkualitas adalah belanja yg dialokasikan berdasarkan prioritas pembangunan daerah yang dilakukan secara efisien dan efektif, tepat waktu, transparan dan akuntabel.***

Pasal 45 UU APBN 2019 (2020)

Pemerintah dalam melaksanakan APBN Tahun Anggaran 2019 mengupayakan pemenuhan **sasaran pertumbuhan (pembangunan) ekonomi yang berkualitas**, yang tercermin dalam:

- a) penurunan kemiskinan menjadi sebesar 8,5% - 9,5%;
- b) tingkat pengangguran terbuka menjadi sebesar 4,8% - 5,2%;
- c) penurunan Gini Ratio menjadi sebesar 0,380 - 0,385; dan
- d) peningkatan Indeks Pembangunan Manusia mencapai 71,98



APBN Berkualitas adalah APBN yang mengoptimalkan pendapatan, dan belanjanya dialokasikan berdasarkan prioritas pembangunan nasional yang dilakukan secara efisien dan efektif, tepat waktu (realisasi pendapatan & belanja), transparan dan akuntabel (Juanda, 2019)

Model Makro (Keyness) Sederhana

- *AS (Aggregate Supply) = AD (Aggregate Demand)*
- $Y = C + I + G + (EX-IM)$
- Misal: $C = c_0 + c_1 (Y-T)$ dan $EX-IM=0$

- $Y = c_0 + c_1 (Y-T) + I + G$

Pdptn
APBN

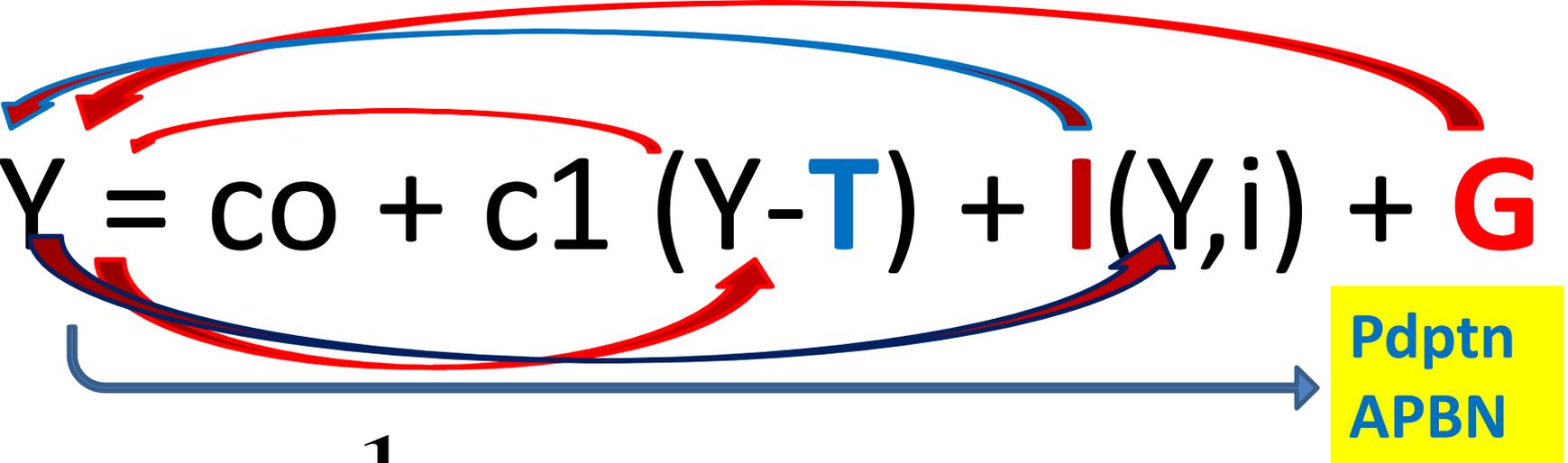
$$Y = \frac{1}{1 - c_1} [c_0 + \bar{I} + \bar{G} - c_1 T]$$

Multiplier Effect

Model Makro (Keyness) Sederhana

- AS (Aggregate Supply) = AD (Aggregate Demand)
- $Y = C + I + G + (EX-IM)$
- Misal: $C = c_0 + c_1(Y-T)$ dan $EX-IM=0$

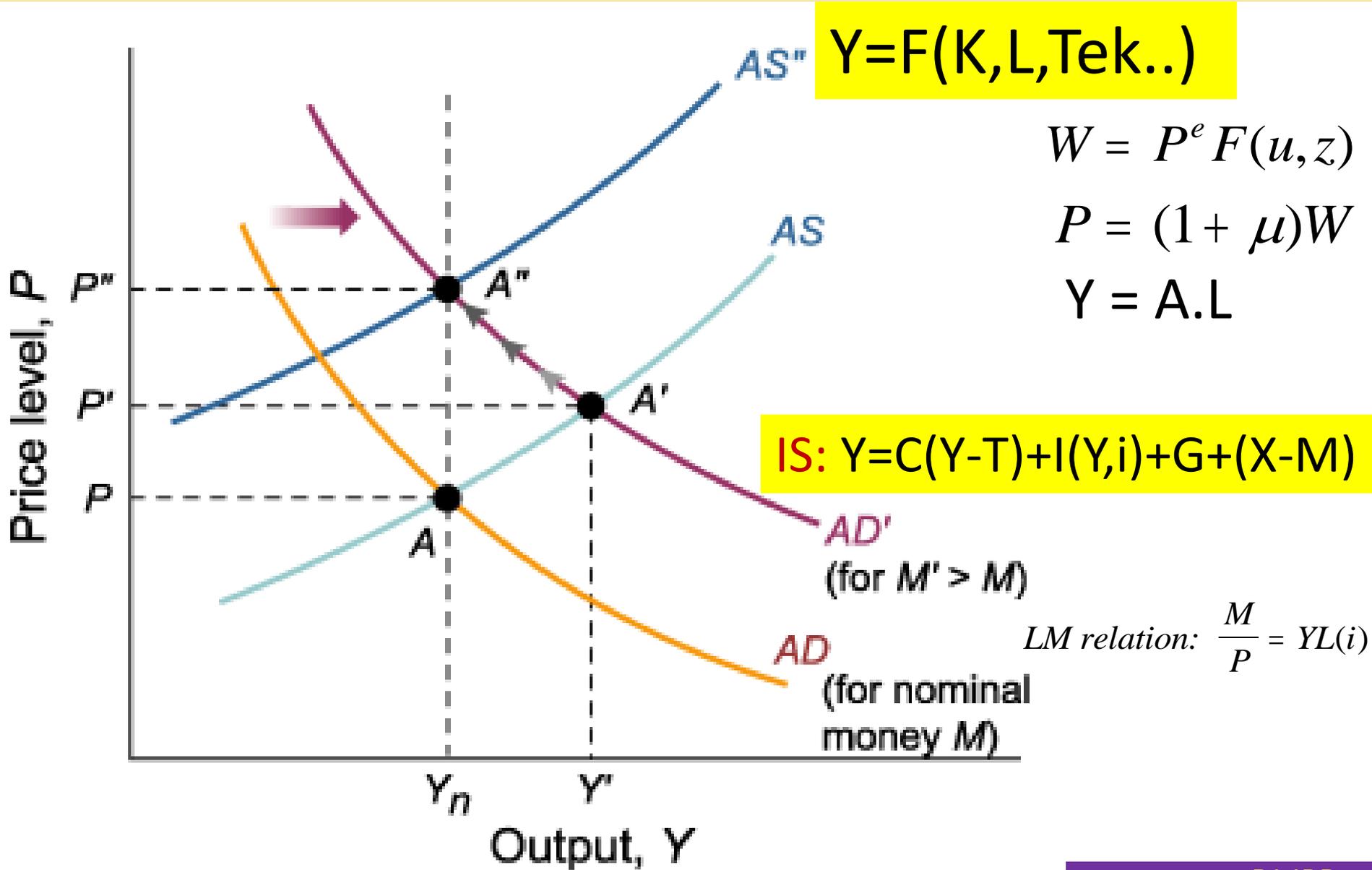
- $Y = c_0 + c_1(Y-T) + I(Y,i) + G$



Pdptn
APBN

$$Y = \frac{1}{1 - c_1} [c_0 + \bar{I} + \bar{G} - c_1 T]$$

Perkembangan Output akibat peningkatan AD dan/atau AS



Efisiensi & Efektifitas APBN

- **Efektifitas** pencapaian sasaran PN merupakan **perbandingan antara realisasi dengan target sasaran PN** yang telah ditetapkan.
- Ukuran **efisiensi** biasanya mengukur suatu rasio bagaimana besaran output yang dihasilkan oleh alokasi input yang digunakan.
- Ada beberapa output (**4 sasaran pembangunan yang berkualitas** dalam APBN 2020) dan banyak input (alokasi belanja)

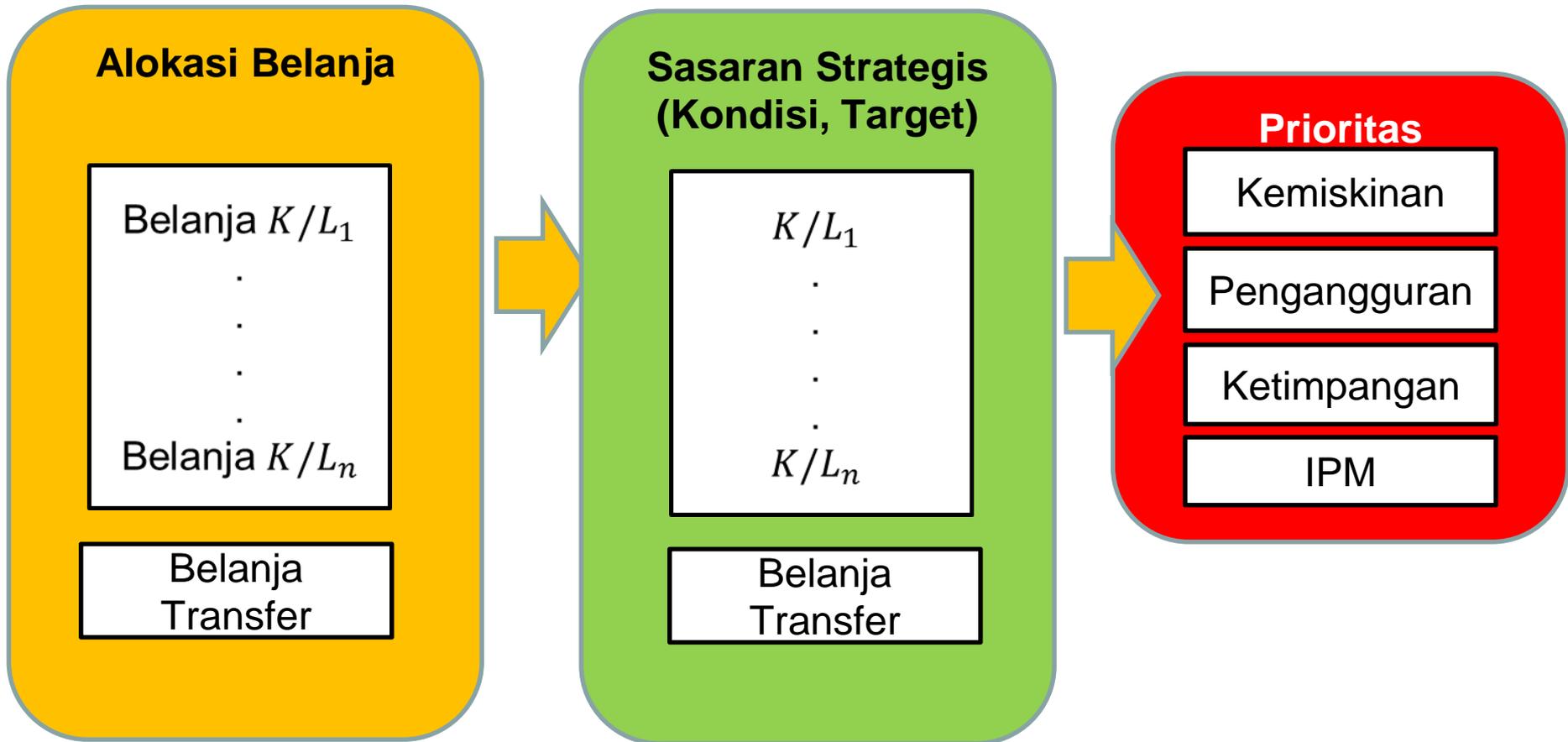
Efisiensi & Efektifitas Belanja

Salah satu mengukur **efisiensi** dan juga secara **tidak langsung** mengukur **efektifitas**, dapat dilihat dari bagaimana **pengaruh** dari masing-masing **belanja** tersebut terhadap masing-masing dari **4 sasaran pembangunan berkualitas**. Pengaruh dari masing-masing belanja ini dapat dilihat **dari koefisien model ekonometrik**. Hasil dugaan koefisien model ekonometrik dapat dijadikan justifikasi alokasi belanja dalam APBN selama ini, apakah berkualitas atau tidak.

Klasifikasi Input (Alokasi Belanja)

- 1. Alokasi belanja berdasarkan Kementerian/Lembaga (K/L) dan Belanja Transfer.** Lihat Gambar 2.1. Karena sekarang ada 86 K/L dan data series terbatas maka saat ini yang dibahas berdasarkan klasifikasi lainnya;
- 2. Alokasi belanja berdasarkan urusan wajib pelayanan dasar (SPM), Non-SPM serta Belanja Transfer.** Lihat Gambar 2.2;
- 3. Alokasi menurut jenis belanja** seperti: pegawai, barang, modal, subsidi, hibah, social dan lain-lain. Lihat Gambar 2.3;

Alokasi Belanja Berdasarkan Kementerian/Lembaga



Hasil *Econometric Modelling* dpt dijadikan justifikasi alokasi ke K/L-K/L.

Metode Analisis (Pengaruh Peningkatan Realisasi Anggaran K=L terhadap Indikator Prioritas Versi Gabungan) :

$$Pov_t = \alpha_0 + \alpha_1 K/L(1)_t + \alpha_2 K/L(2)_t + \dots + \alpha_3 K/L(n)_t + \alpha_4 Btransfer_t + \varepsilon_t$$

$$GINIt = \alpha_0 + \alpha_1 K/L(1)_t + \alpha_2 K/L(2)_t + \dots + \alpha_3 K/L(n)_t + \alpha_4 Btransfer_t + \varepsilon_t$$

$$Unempt = \alpha_0 + \alpha_1 K/L(1)_t + \alpha_2 K/L(2)_t + \dots + \alpha_3 K/L(n)_t + \alpha_4 Btransfer_t + \varepsilon_t$$

$$IPMt = \alpha_0 + \alpha_1 K/L(1)_t + \alpha_2 K/L(2)_t + \dots + \alpha_3 K/L(n)_t + \alpha_4 Btransfer_t + \varepsilon_t$$

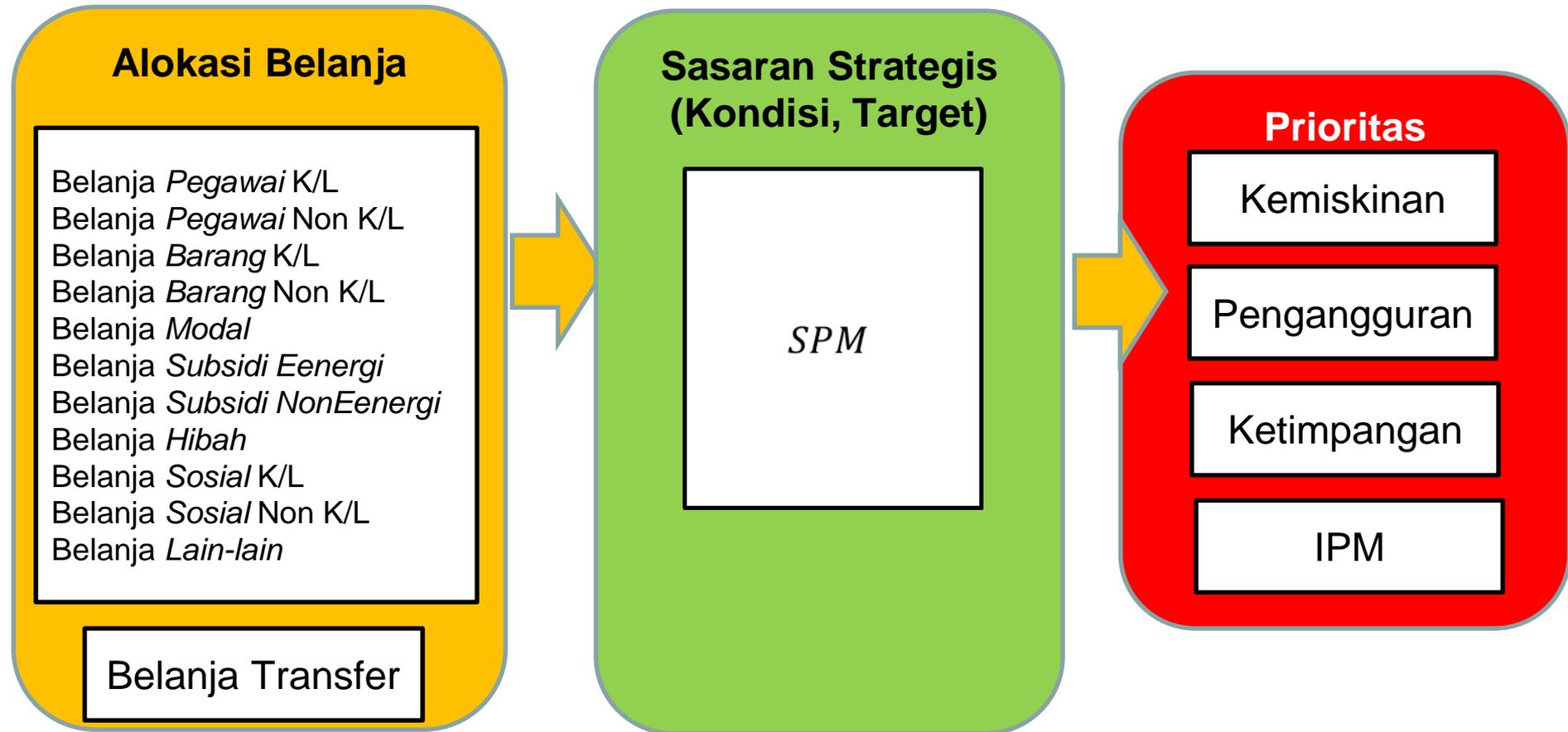
variabel x = Belanja Kementerian dan Lembaga terkait dan Belanja transfer

Variabel y = Indikator Prioritas [kemiskinan (Pov) , pengangguran (Unemp), ketimpangan (Gini), indeks pembangunan manusia (IPM)]

Kurang memadai modelnya karena terlalu banyak K/L

→ Check Matriks Korelasi antara Indikator Prioritas & Belanja tiap K/L

Alokasi Belanja Berdasarkan Jenis Belanja



Hasil *Econometric Modelling* dpt dijadikan justifikasi alokasi ke jenis Belanja.

Metode Analisis (Pengaruh Realisasi Anggaran menurut Jenis Belanja terhadap Indikator Prioritas) :

$$Pov_t = \alpha_0 + \alpha_1 BM_t + \alpha_2 BB_t + \alpha_3 BP_t + \alpha_4 BBSt + \epsilon_t$$

$$GINI_t = \alpha_0 + \alpha_1 BM_t + \alpha_2 BB_t + \alpha_3 BP_t + \alpha_4 BBSt + \epsilon_t$$

$$Unemp_t = \alpha_0 + \alpha_1 BM_t + \alpha_2 BB_t + \alpha_3 BP_t + \alpha_4 BBSt + \epsilon_t$$

$$IPM_t = \alpha_0 + \alpha_1 BM_t + \alpha_2 BB_t + \alpha_3 BP_t + \alpha_4 BBSt + \epsilon_t$$

variabel x = Realisasi Jenis Belanja (Bm (belanja modal), BB (belanja barang), BP (belanja pegawai), BBS (belanja bantuan sosial)

Variabel y= Indikator Prioritas (kemiskinan (Pov) , pengangguran (Unemp), ketimpangan (Gini), indeks pembangunan manusia (IPM))

Model Pengaruh Realisasi Anggaran menurut Jenis Belanja terhadap Indikator Prioritas kemiskinan:

$$\text{Pov}_t = 70.6 - 3.34 \text{LnBP}_t - 3.08 \text{LnBB}_t + 2.08 \text{LnBM}_t + 0.74 \text{LnBM}_{t-1} - 0.73 \text{LnBBS}_t - 1.14 \text{LnSTot}_t + \varepsilon_t$$

(.00)* (.055)* (.035)* (0.06) (0.22) (0,16) (.05)*

R-sq = 0.99

Pov_t = Tingkat kemiskinan (%)

LnBP_t = Ln- Belanja pegawai pada tahun t (Milyar Rp)

LnBB_t = Ln- Belanja Barang pada tahun t (Milyar Rp)

LnBM_t = Ln- Belanja Modal pada tahun t (Milyar Rp)

LnBBS_t = Ln- Belanja Bantuan Sosial pada tahun t (Milyar Rp)

LnBM_{t-1} = Ln- Belanja Modal pada tahun t-1 (Milyar Rp)

LnSTot_t = Ln- Subsidi Total pada tahun t (Trilyun Rp)

ε = Error term

t = Waktu (tahun)

* keterangan : **angka di dalam kurung** adalah P value (Two-way & **One-way test**)

P-value: peluang kesalahan menyimpulkan Belanja tsb dapat menurunkan *poverty rate*

Belanja yang dapat menurunkan Kemiskinan (dgn urutan elastisitasnya) adalah Belanja Pegawai (-.033), Barang (-.031), Subsidi Total (-.011), Bantuan Sosial (-.007). Belanja Modal sebenarnya berkorelasi negatif dengan Kemiskinan, tapi karena masalah multikolinear, tidak signifikan dan arahnya berlawanan

Diskusi dgn Tema APBN yang Berkualitas
Direktorat Penyusunan APBN , 3 Des 2019

Linear regression

Number of obs = 12
 F(6, 5) = 182.76
 Prob > F = 0.0000
 R-squared = 0.9909
 Root MSE = .35215

POV	Coef.	Robust Std. Err.	t	P> t	[95% Conf. Interval]	
LnBP	-3.335017	1.717986	-1.94	0.110	-7.75124	1.081207
LnBB	-3.077695	1.345738	-2.29	0.071	-6.537025	.3816347
LnBM						
--.	2.083949	.8397077	2.48	0.056	-.0745879	4.242487
L1.	.7421275	.5268165	1.41	0.218	-.6120973	2.096352
LnBBS	-.7289007	.6696089	-1.09	0.326	-2.450185	.9923837
LnSTotal	-1.137449	.5843618	-1.95	0.109	-2.639599	.3647009
_cons	70.60064	8.517756	8.29	0.000	48.70505	92.49623

Semua Variabel Belanja (X) **berkorelasi Negatif** dengan Tingkat Kemiskinan (POV). Ada **korelasi positif** antara Variabel Bebas Belanja (Multikolineritas). Angka dibawahnya adalah **p-value**.

	POV	LnBP	LnBB	LnBM	L.LnBM	LnBBS	LnSTotal
POV	1.0000						
LnBP	-0.9506 0.0000	1.0000					
LnBB	-0.9434 0.0000	0.9920 0.0000	1.0000				
LnBM	-0.9100 0.0000	0.9754 0.0000	0.9741 0.0000	1.0000			
L.LnBM	-0.9514 0.0000	0.9679 0.0000	0.9436 0.0000	0.9207 0.0000	1.0000		
LnBBS	-0.6247 0.0224	0.7013 0.0076	0.6540 0.0153	0.7299 0.0046	0.5196 0.0834	1.0000	
LnSTotal	-0.5687 0.0426	0.5281 0.0636	0.4532 0.1199	0.5514 0.0508	0.4760 0.1177	0.7012 0.0076	1.0000

Metode Analisis (Pengaruh Realisasi Anggaran menurut Jenis Belanja terhadap Indikator Prioritas Pengangguran) :

$$\text{Unemp}_t = 52,21 - 2,24 \text{ LnBP}_t - 0,58 \text{ LnBB}_{t-1} - 1,54 \text{ LnBM}_{t-1} - 0,85 \text{ LnBBS}_t + \varepsilon_t$$

$(0,00)^* \quad (0,294) \quad (0,610) \quad (0,75) \quad (0,008)^*$

R-sq = 0.9837

$$\text{Unemp}_t = 53,48 - 3,92 \text{ LnBP}_t + 0,46 \text{ LnBB}_{t-1} - 0,11 \text{ LnBBS}_t - 0,59 \text{ LnSTotal}_t + \varepsilon_t$$

$(0,00) \quad (0,012)^* \quad (0,566) \quad (0,762) \quad (0,03)^*$

R-sq = 0.9923

Unemp_t = Tingkat pengangguran terbuka (%)
 LnBP_t = Ln- Belanja pegawai pada tahun t (Milyar Rp)
 LnBB_{t-1} = Ln- Belanja Barang pada tahun t-1 (Milyar Rp)
 LnBBS_t = Ln- Belanja Bantuan Sosial pada tahun t (Milyar Rp)
 ε_t = Error term
 t = Waktu (tahun)
 LnBM_{t-1} = Ln- Belanja Modal pada t-1 (Milyar Rp)
 LnSTot_t = Ln- Subsidi Total pada tahun t (Trilyun Rp)

* keterangan : **angka di dalam kurung** adalah P value

Belanja yang dapat menurunkan tingkat pengangguran adalah Belanja Bantuan Sosial dan Subsidi Total, dengan elastisitas -.008 dan -.006. Belanja lainnya sebenarnya berkorelasi negatif dengan pengangguran, tapi karena masalah multikolinear, tidak signifikan.

Model Pengaruh masing-masing Jenis Belanja terhadap Indikator Pengangguran (tanpa memerhatikan faktor lainnya) :

$$\text{Unemp}_t = 46,16 - 3,23 \text{ LnBP}_t + \varepsilon_t$$

$(0,00)^* \quad (0,00)^*$

$$\text{Unemp}_t = 36,19 - 2,48 \text{ LnBB}_t + \varepsilon_t$$

$(0,00)^* \quad (0,00)^*$

$$\text{Unemp}_t = 44,21 - 1,385 \text{ LnBM}_t - 1,818 \text{ LnBM}_{t-1} + \varepsilon_t$$

$(0,00)^* \quad (0,067)^* \quad (0,011)^*$

$$\text{Unemp}_t = 44,63 - 3,37 \text{ LnBBS}_t + \varepsilon_t$$

$(0,002)^* \quad (0,007)^*$

$$\text{Unemp}_t = 21,41 - 2,63 \text{ LnSTotal}_t + \varepsilon_t$$

$(0,002)^* \quad (0,025)^*$

Linear regression

Number of obs = 12
F(4, 7) = 818.00
Prob > F = 0.0000
R-squared = 0.9837
Root MSE = .27515

UNEMP	Coef.	Robust Std. Err.	t	P> t	[95% Conf. Interval]	
LnBP	-2.244908	1.983102	-1.13	0.295	-6.9342	2.444383
LnBB						
L1.	-.5867433	1.10047	-0.53	0.610	-3.188942	2.015455
LnBM						
L1.	-.154208	.4657303	-0.33	0.750	-1.255485	.9470691
LnBBS	-.8522037	.23237	-3.67	0.008	-1.401671	-.302736
_cons	52.21719	8.512526	6.13	0.000	32.08827	72.34612

Linear regression

Number of obs = 12
 F(4, 7) = 444.83
 Prob > F = 0.0000
 R-squared = 0.9923
 Root MSE = .18944

UNEMP	Coef.	Robust Std. Err.	t	P> t	[95% Conf. Interval]	
LnBP	-3.92056	1.164453	-3.37	0.012	-6.674053	-1.167067
LnBB						
L1.	.4693342	.7803364	0.60	0.566	-1.375868	2.314537
LnBBS	-.1124733	.3573127	-0.31	0.762	-.9573835	.732437
LnSTotal	-.5979572	.2230737	-2.68	0.032	-1.125443	-.0704719
_cons	53.48223	4.794662	11.15	0.000	42.14466	64.8198

Semua Variabel Belanja (X) **berkorelasi Negatif** dengan Pengangguran (UNEMP). Ada **korelasi positif** antara Variabel Bebas Belanja (Multikolinieritas). Angka dibawahnya adalah **p-value**.

	UNEMP	LnBP	LnBB	LnBM	L.LnBM	LnBBS	LnSTotal
UNEMP	1.0000						
LnBP	-0.9816 0.0000	1.0000					
LnBB	-0.9653 0.0000	0.9920 0.0000	1.0000				
LnBM	-0.9497 0.0000	0.9754 0.0000	0.9741 0.0000	1.0000			
L.LnBM	-0.9631 0.0000	0.9679 0.0000	0.9436 0.0000	0.9207 0.0000	1.0000		
LnBBS	-0.7023 0.0074	0.7013 0.0076	0.6540 0.0153	0.7299 0.0046	0.5196 0.0834	1.0000	
LnSTotal	-0.6154 0.0252	0.5281 0.0636	0.4532 0.1199	0.5514 0.0508	0.4760 0.1177	0.7012 0.0076	1.0000

Metode Analisis (Pengaruh Realisasi Anggaran menurut Jenis Belanja terhadap Indikator Prioritas Ketimpangan daerah) :

$$\text{LnIW}_t = 0,44 - 0,09 \text{LnBP}_t + 0,05 \text{LnBB}_{t-1} - 0,024 \text{LnBM}_{t-1} + 0,002 \text{LnBBS}_t + \varepsilon_t$$

(0,0)* (0,001)* (0,012) (0,072)* (0,749)

- LnIW = Ln- Indeks Williamson (indeks)
- LnBP_t = Ln- Belanja pegawai pada tahun t (Rp)
- LnBB_{t-1} = Ln- Belanja Barang pada tahun t-1 (Rp)
- LnBBS_t = Ln- Belanja Bantuan Sosial pada tahun t (Rp)
- ε = Error term
- LnBM_{t-1} = Ln- Belanja Modal pada t-1 (Rp)

* keterangan : angka di dalam kurung adalah P value

Belanja yang dapat menurunkan Ketimpangan antar Wilayah adalah Belanja Pegawai dan Modal, dengan elastisitas -.09 dan -.024. Belanja lainnya sebenarnya berkorelasi negatif dengan Ketimpangan antar Wilayah, tapi karena masalah multikolinear, tidak signifikan.

Pengaruh Realisasi Anggaran masing-masing Jenis Belanja terhadap Indikator Ketimpangan daerah (tanpa memerhatikan faktor lainnya) :

$$\text{LnIW}_t = 0,19 - 0,043 \text{LnBP}_t + \varepsilon_t$$

(0,002)* (0,00)*

$$\text{LnIW}_t = 0,059 - 0,033 \text{LnBB}_t + \varepsilon_t$$

(0,168) (0,00)*

$$\text{LnIW}_t = 0,138 - 0,006 \text{LnBM}_t - 0,033 \text{LnBM}_{t-1} + \varepsilon_t$$

(0,057)* (0,646) (0,018)*

$$\text{LnIW}_t = 0,168 - 0,044 \text{LnBBS}_t + \varepsilon_t$$

(0,313) (0,01)*

Linear regression

Number of obs = 12
F(4, 7) = 276.78
Prob > F = 0.0000
R-squared = 0.9444
Root MSE = .00697

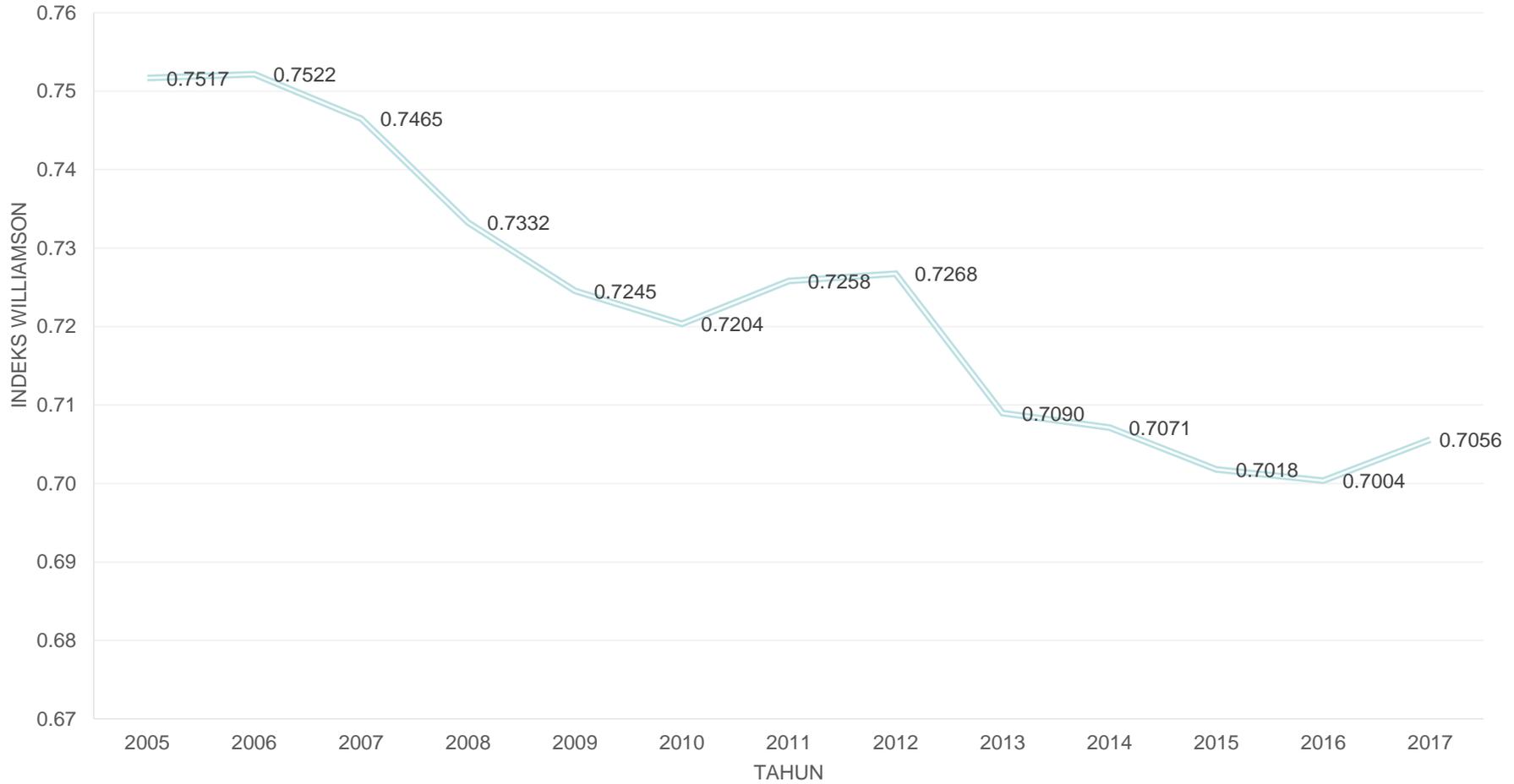
	Coef.	Robust Std. Err.	t	P> t	[95% Conf. Interval]	
LnIW						
LnBP	-.0907736	.016216	-5.60	0.001	-.1291182	-.0524289
LnBB						
L1.	.0501995	.0149291	3.36	0.012	.0148978	.0855012
LnBM						
L1.	-.0240562	.011355	-2.12	0.072	-.0509065	.0027941
LnBBS	.0020621	.0061938	0.33	0.749	-.012584	.0167081
_cons	.4431779	.038316	11.57	0.000	.3525749	.5337809

Semua Variabel Belanja (X) **berkorelasi Negatif** dengan Ketimpangan (IW). Ada **korelasi positif** antara Variabel Bebas Belanja (Multikolineritas). Angka dibawahnya adalah **p-value**.

	LnIW	LnBP	LnBB	LnBM	L. LnBM	LnBBS
LnIW	1.0000					
LnBP	-0.9577 0.0000	1.0000				
LnBB	-0.9438 0.0000	0.9920 0.0000	1.0000			
LnBM	-0.9063 0.0000	0.9754 0.0000	0.9741 0.0000	1.0000		
L. LnBM	-0.9421 0.0000	0.9679 0.0000	0.9436 0.0000	0.9207 0.0000	1.0000	
LnBBS	-0.6814 0.0103	0.7013 0.0076	0.6540 0.0153	0.7299 0.0046	0.5196 0.0834	1.0000

Perkembangan Ketimpangan Antar Daerah (Tren menurun)

INDEKS WILLIAMSON



Semua Variabel Belanja (X) **berkorelasi Positif** dengan Ketimpangan Antar Individu (Gini). Ada **korelasi positif** antara Variabel Bebas Belanja (Multikolinieritas). Angka dibawahnya **p-value**.

	LnGINI	LnBP	LnBB	LnBM	LnBBS	LnSTotal
LnGINI	1.0000					
LnBP	0.8491 0.0002	1.0000				
LnBB	0.8258 0.0005	0.9920 0.0000	1.0000			
LnBM	0.8674 0.0001	0.9754 0.0000	0.9741 0.0000	1.0000		
LnBBS	0.7569 0.0027	0.7013 0.0076	0.6540 0.0153	0.7299 0.0046	1.0000	
LnSTotal	0.7778 0.0017	0.5281 0.0636	0.4532 0.1199	0.5514 0.0508	0.7012 0.0076	1.0000

Pengaruh masing-masing jenis belanja cenderung meningkatkan ketimpangan antar individu (GINI). Tergantung juga pemerintah daerah dlm mengalokasikan belanja di daerahnya, apalagi dalam era otonomi daerah sekarang ini

Perkembangan Ketimpangan Antar Individu (Tren Menaik)

GINI RASIO



Pengaruh Realisasi Anggaran masing-masing Jenis Belanja terhadap Indikator Indeks pembangunan manusia (tanpa memerhatikan faktor lainnya) :

$$\text{LnIPM}_t = 3,55 + 0,05 \text{ LnBP}_t + \varepsilon_t \quad \text{Adj-R}^2 = 0.9434$$

$(0,00)^* \quad (0,00)^*$

$$\text{LnIPM}_t = 3,71 + 0,04 \text{ LnBB}_t + \varepsilon_t \quad \text{Adj-R}^2 = 0.9625$$

$(0,00)^* \quad (0,00)^*$

$$\text{LnIPM}_t = 3,57 + 0,03 \text{ LnBM}_t + 0,02 \text{ LnBM}_{t-1} + \varepsilon_t \quad \text{Adj-R}^2 = 0.9208$$

$(0,00)^* \quad (0,04)^* \quad (0,05)^*$

$$\text{LnIPM}_t = 3,70 + 0,04 \text{ LnBBS}_t + \varepsilon_t \quad \text{Adj-R}^2 = 0.2444$$

$(0,00)^* \quad (0,00)^*$

$$\text{LnIPM}_t = 4,05 + 0,03 \text{ LnSTotal}_t + \varepsilon_t \quad \text{Adj-R}^2 = 0.0805$$

$(0,00)^* \quad (0,09)^*$

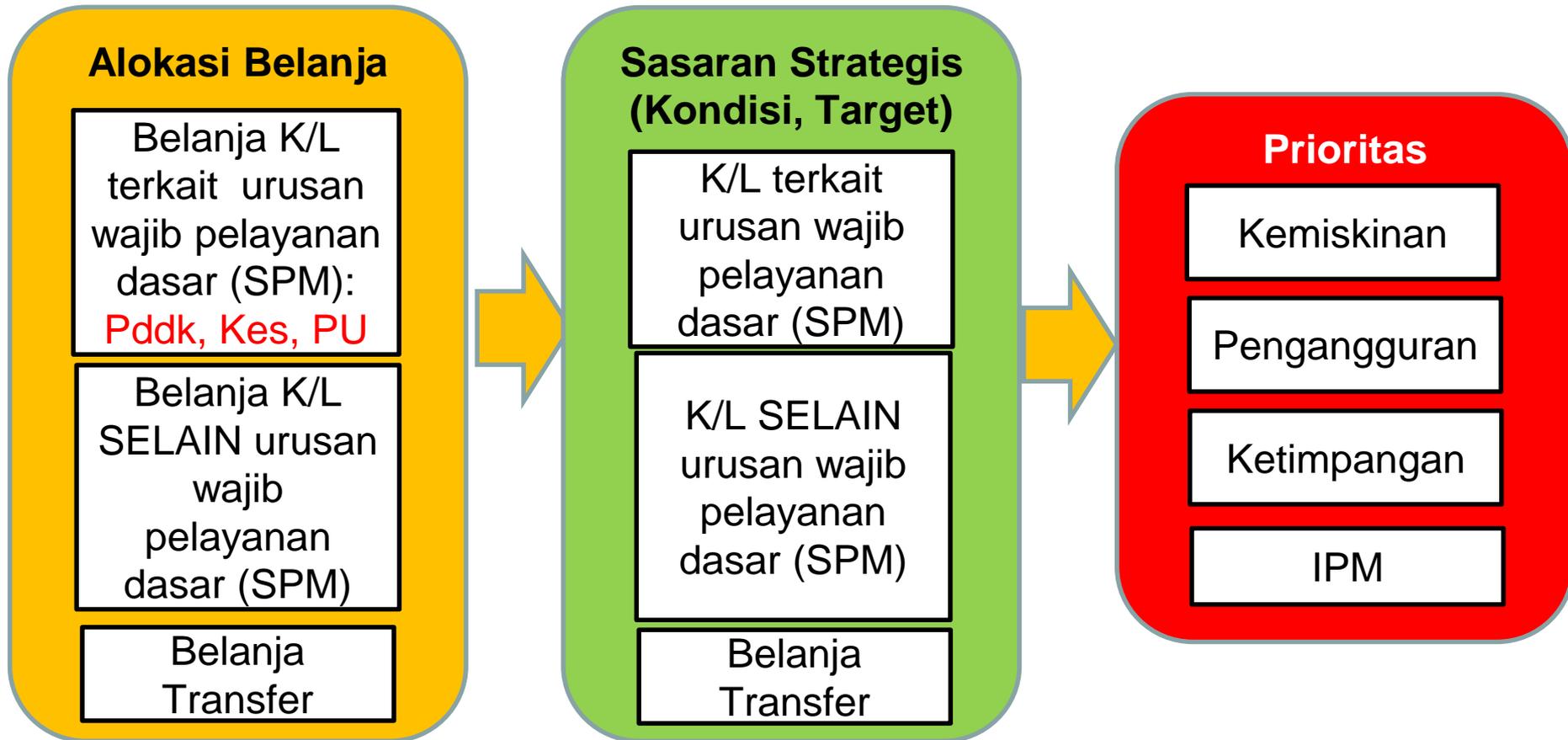
Source	SS	df	MS	Number of obs	=	13
				F(3, 9)	=	87.03
Model	.01162903	3	.003876343	Prob > F	=	0.0000
Residual	.000400852	9	.000044539	R-squared	=	0.9667
				Adj R-squared	=	0.9556
Total	.012029882	12	.00100249	Root MSE	=	.00667

LnIPM	Coef.	Std. Err.	t	P> t	[95% Conf. Interval]	
LnBP	.0304315	.0098363	3.09	0.013	.0081802	.0526827
LnBM	.0327728	.0111573	2.94	0.017	.0075332	.0580123
LnBBS	-.0315759	.0080809	-3.91	0.004	-.0498561	-.0132956
_cons	3.163129	.2067397	15.30	0.000	2.695451	3.630807

Semua Variabel Belanja (X) **berkorelasi Positif** dengan IPM. Ada **korelasi positif** antara Variabel Bebas Belanja (Multikolinieritas). Angka dibawahnya adalah **p-value**.

	LnIPM	LnBP	LnBB	LnBM	L.LnBM	LnBBS	LnSTotal
LnIPM	1.0000						
LnBP	0.9737 0.0000	1.0000					
LnBB	0.9827 0.0000	0.9920 0.0000	1.0000				
LnBM	0.9462 0.0000	0.9754 0.0000	0.9741 0.0000	1.0000			
L.LnBM	0.9476 0.0000	0.9679 0.0000	0.9436 0.0000	0.9207 0.0000	1.0000		
LnBBS	0.5544 0.0493	0.7013 0.0076	0.6540 0.0153	0.7299 0.0046	0.5196 0.0834	1.0000	
LnSTotal	0.3964 0.1800	0.5281 0.0636	0.4532 0.1199	0.5514 0.0508	0.4760 0.1177	0.7012 0.0076	1.0000

Alokasi Belanja Berdasarkan Urusan Wajib Pelayanan Dasar



Hasil *Econometric Modelling* dpt dijadikan justifikasi alokasi ke K/L-K/L.

Pengaruh belanja pemerintah terhadap IPM dan Komponennya

Variabel	LnRLS		LnAHH		LnIPM	
	Koef	Prob	Koef	Prob	Koef	Prob
LnSPM.L1	0.006	0.010***	0.001	0.026**	0.005	0.000***
LnBELSUB	0.001 (CONSTRAINT)		0.002	0.029**	0.001 (CONSTRAINT)	
LnDTU.L1	0.051	0.020**	0.006	0.053*	0.222	0.002***
LnNONSPM	-0.015	0.218	0.014	0.000***	0.012	0.146
C	1.847	0.000***	3.975	0.000***	3.674	0.000***
R-squared	0.8960		0.9829			

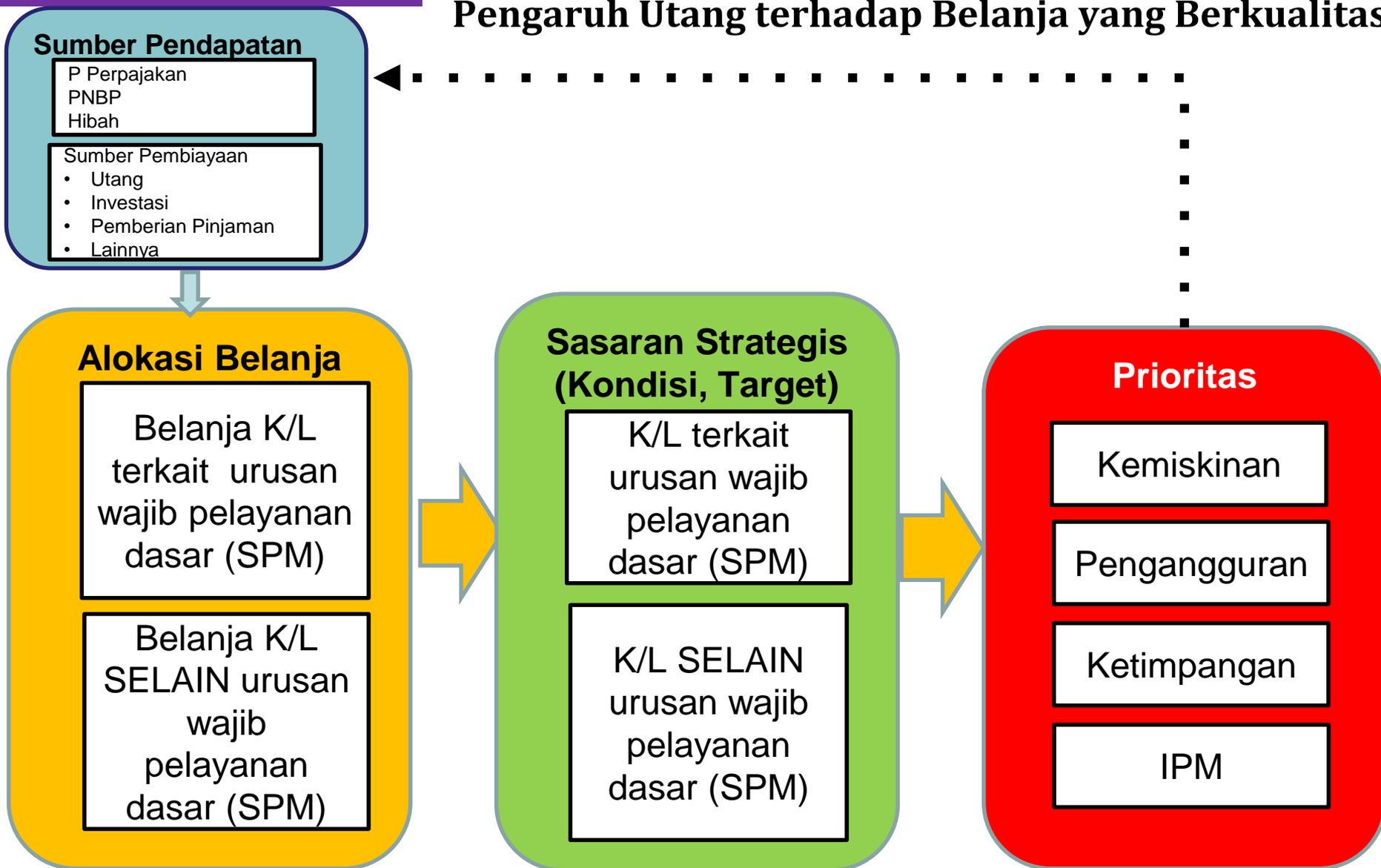
Sumber: Suraningsih & Juanda (2019)

Keterangan: *** : Signifikan pada taraf nyata 1%

** : Signifikan pada taraf nyata 5%

* : Signifikan pada taraf nyata 10%

Pengaruh Utang terhadap Belanja yang Berkualitas



Hasil *Econometric Modelling* dpt dijadikan justifikasi sumber pendapatan

Pengaruh Utang thd Belanja Pelayanan Dasar (SPM) dan Subsidi (**Produktif?**)

Variabel	LnSPM		LnSUBSIDI	
	<i>Robbust Standart Error</i>			
	Koef	Prob	Koef	Prob
LnUTANGPEMERINTAH	2.483	0.084*	0.148	0.831
LnPAJAK	-0.082	0.967	1.082	0.504
LnPNBP	0.501	0.592	1.322	0.009***
LnPMTB	7.744	0.040**	-1.915	0.310
LnHIBAH	0.737	0.148	-0.058	0.811
C	-83.956	0.045**	17.998	0.368
R-squared	0.9704		0.7861	

Sumber : Suraningsih dan Juanda (2019)

Keterangan : ***Signifikan pada taraf nyata 1%, **Signifikan pada taraf nyata 5%, *Signifikan pada taraf nyata 10%

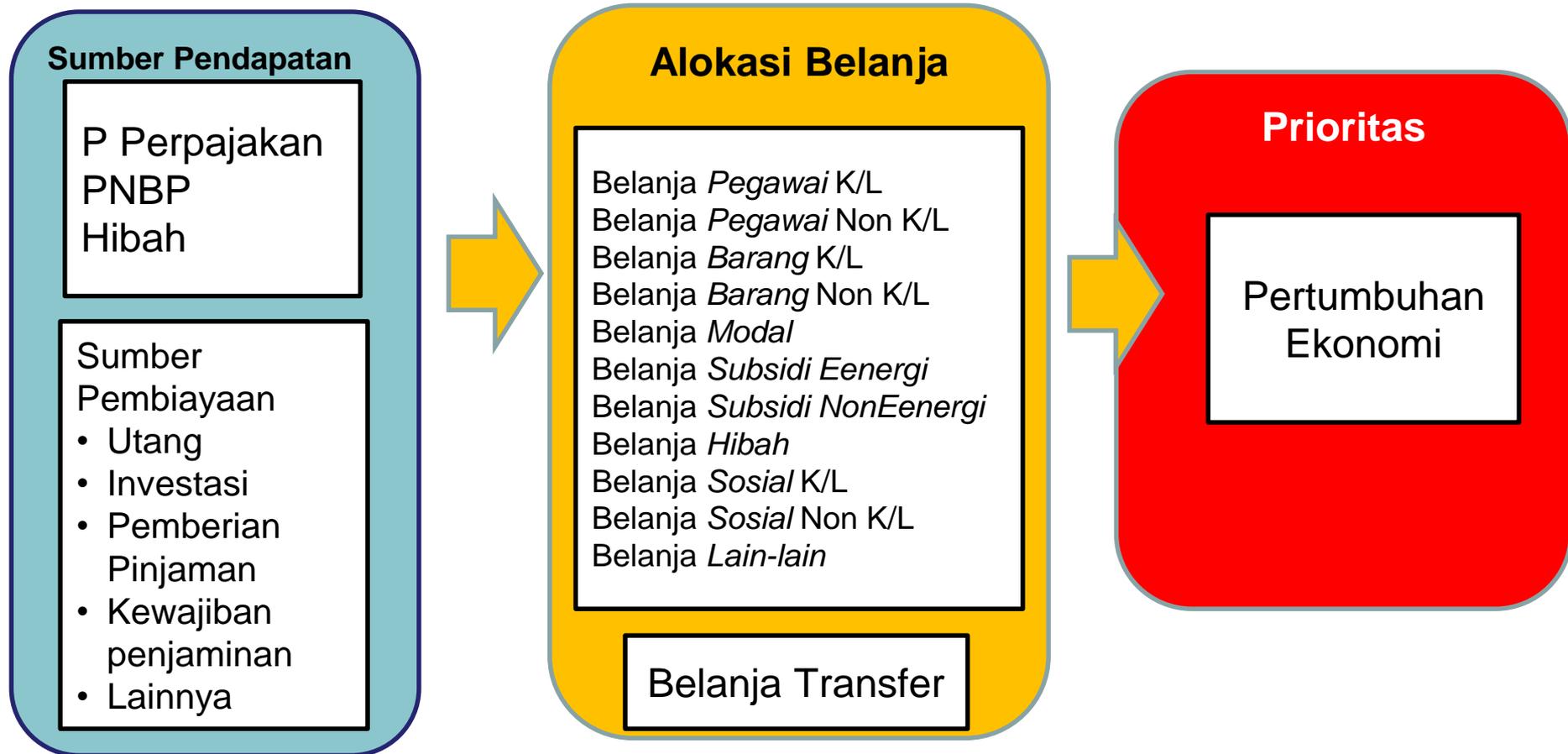
Pengaruh Utang thd Belanja Selain Pelayanan Dasar (NonSPM) & DTU (**Produktif?**)

Variabel	LnNONSPM		LnDTU	
	<i>Robbust Standart Error</i>			
	Koef	Prob	Koef	Prob
LnUTANGPEMERINTAH	0.905	0.015**	0.338	0.037**
LnPAJAK	-1.327	0.126	0.102	0.818
LnPNBP	0.425	0.093*	0.266	0.047**
LnPMTB	3.003	0.008***	0.895	0.101
LnHIBAH	0.231	0.073*	-0.022	0.697
C	-30.121	0.021**	-11.263	0.059*
R-squared	0.9639		0.9759	

Sumber : Suraningsih dan Juanda (2019)

Keterangan : ***Signifikan pada taraf nyata 1%, **Signifikan pada taraf nyata 5%, *Signifikan pada taraf nyata 10%

Pengaruh Utang terhadap Belanja yang Berkualitas & keberlanjutannya



Hasil *Econometric Modelling* dpt dijadikan justifikasi alokasi ke jenis Belanja & sumber pembiayaan.

Pengaruh Utang terhadap Belanja Pegawai (**Produktif?**)

Variabel	D.LnPegawai	
	(Robust) Koefisien	p-value
D.growth	.00129	0.820
<i>D.Utang_{t-1}</i>	.00099	0.630
<i>D.Utang_{t-1}.Djkw</i>	.00232	*0.049
D.LnFDI	-.08747	*0.018
D.LnPMTB	.37722	**0.003
D.LnPNBP	.05537	0.292
D.LnPNP	.34814	0.086
Cons	.00796	0.712
R-squared	0.562	
Prob (Chi2-Statistic)	0.000	

Sumber : Hutaria, Juanda, Purnamadewi (2019).

Keterangan : ***Signifikan pada taraf nyata 1%, **Signifikan pada taraf nyata 5%, *Signifikan pada taraf nyata 10%

Pengaruh Utang terhadap Belanja Modal (**Produktif?**)

Variabel	D.LnModal	
	(Robust) Koefisien	p-value
D.LnGDP	2.8350	0.218
<i>D.Utang_{t-1}</i>	-.00852	0.136
<i>D.Utang_{t-1}.Djkw</i>	.00836	***0.000
D.LnFDI	-.21194	0.143
D.LnPMTB	-.90815	0.141
D.LnPNBP	.24771	0.156
D.LnPNP	.57892	0.273
Cons	-.13652	0.073
R-squared	0.3382	
Prob (Chi2-Statistic)	0.000	

Keterangan : ***Signifikan pada taraf nyata 1%, **Signifikan pada taraf nyata 5%, *Signifikan pada taraf nyata 10%

Pengaruh Utang terhadap Belanja TKDD (**Produktif?**)

Variabel	LnTKDD	
	(Robust) Koefisien	p-value
LnGDP	.48811	0.577
<i>Utang</i> _{t-1}	.00785	*0.051
<i>Utang</i> _{t-1} .Djkw	.01659	***0.009
LnFDI	.38392	***0.000
LnPMTB	-.45714	0.446
LnPNBP	.54973	***0.000
LnPNP	.64889	***0.005
Cons	-13.00477	0.073
R-squared	0.9799	
Prob (Chi2-Statistic)	0.000	

Sumber : Hutaria, Juanda, Purnamadewi (2019).

Keterangan : ***Signifikan pada taraf nyata 1%, **Signifikan pada taraf nyata 5%, *Signifikan pada taraf nyata 10%

- $Pegawai_t$ = belanja pegawai pemerintah pusat riil pada periode t (Milyar Rp)
- $Modal_t$ = belanja modal pemerintah pusat riil pada periode t (Milyar Rp)
- $TKDD_t$ = belanja transfer ke daerah dan dana desa riil pada periode t (Milyar Rp)
- $Utang_{t-1}$ = rasio utang pemerintah terhadap GDP pada periode t-1 (%)
- D_{jkw} = Dummy pemerintahan (1= pemerintahan periode 2014-2017,
0=pemerintahan sebelum periode 2014-2017)
- PNP_t = penerimaan perpajakan pemerintah pusat riil pada periode t (Milyar Rp)
- $PNBP_t$ = penerimaan bukan pajak pemerintah pusat riil pada periode t (Milyar Rp)
- $growth_t$ = pertumbuhan ekonomi pada periode t (%).
- GDP_t = *Gross Domestic Product* atas dasar harga konstan pada periode t (Rp)
- C_t = Konsumsi rumah tangga atas dasar harga konstan pada periode t (Rp)
- $PMTB_t$ = Pembentukan Modal Tetap Bruto atas dasar harga konstan pada periode t (Rp)
- FDI_t = *Foreign Direct Investment* pada periode t (USD)
- $Ekspor_t$ = Nilai ekspor barang dan jasa atas dasar harga konstan pada periode t (Rp)
- $Import_t$ = Nilai impor barang dan jasa atas dasar harga konstan pada periode t (Rp)

Faktor-faktor yang mempengaruhi Output Ekonomi (D.LnGDP)

Variabel	Koefisien	P-value
D.LnModal	0.01693	*0.052
D.LnPegawai	0.00100	Constrained
D.LnTKDD	0.02318	0.264
D.LnC	0.52775	**0.000
D.LnPMTB	0.24911	**0.000
D.LnEkspor	0.12985	**0.002
D.LnImpor	-0.12927	**0.003
Cons	0.00665	0.222
Prob(F-Statistic)	0.000	

Sumber : Hutaria, Juanda, Purnamadewi (2019).

Keterangan : ***Signifikan pada taraf nyata 1%, **Signifikan pada taraf nyata 5%, *Signifikan pada taraf nyata 10%

Model Keberlanjutan Utang (Keseimbangan Primer)

Variabel	Koefisien	Pvalue
$Utang_{t-1}$	0.01125	*0.022
LnBelanja	-3.65856	*0.033
$LnPB_{t-1}$	0.55883	**0.001
growth	0.03258	***0.000
LnRev	3.03650	*0.060
Cons	8.22473	**0.019
R-Squared	0.9416	
Prob(F-Statistic)	0.0000	

Sumber : Hutaria, Juanda, Purnamadewi (2019)

PB_t : keseimbangan primer pada periode t (Milyar Rp)

$utang_{t-1}$: rasio utang pemerintah terhadap GDP pada periode t-1 (%)

$Belanja_t$: belanja pemerintah pada periode t (Milyar Rp)

$growth_t$: pertumbuhan ekonomi Indonesia pada periode t (%)

PB_{t-1} : lag dari keseimbangan primer (Milyar Rp)

Rev_t : penerimaan negara yang berasal dari pajak dan nonpajak pada periode t (Milyar Rp)

Penutup

Selama ini alokasi belanja dalam APBN telah diupayakan untuk pemenuhan 4 sasaran pembangunan yang berkualitas, yaitu penurunan kemiskinan, pengangguran dan ketimpangan antar wilayah serta peningkatan Indeks Pembangunan Manusia. Sedangkan untuk penurunan ketimpangan antar individu (Gini Ratio) belum dapat diperbaiki dari alokasi belanja pemerintah pusat. Hal ini karena ketimpangan antar individu dipengaruhi juga oleh alokasi belanja masing-masing pemerintah daerah. Sekitar sepertiga APBN ditransfer ke daerah dan desa, dan masuk ke APBD. Begitu juga sekitar sepertiga belanja pusat dibelanjakan di daerah. Jadi kinerja pembangunan sangat tergantung dari kinerja pembangunan daerah.

Penutup

Salah satu cara mengukur APBN berkualitas, dapat dilihat dari apakah belanja tersebut dialokasikan kepada belanja-belanja yang produktif untuk mencapai sasaran pembangunan berkualitas. Jika untuk mencapai empat sasaran pembangunan berkualitas dibutuhkan total belanja yang lebih besar dari target pendapatan maka harus mencari sumber pembiayaan, diantaranya utang. Keberkelanjutan utang akan terjadi jika penggunaan utang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia melalui berbagai alokasi belanja untuk kegiatan produktif. Jika utang mempengaruhi alokasi belanja atau pengeluaran pemerintah yang bersifat produktif, maka akan mendorong peningkatan output, dan akhirnya akan meningkatkan potensi penerimaan pemerintah yang dapat digunakan untuk membayar utang dan bunganya.

REMORMASI BELANJA PEMERINTAH PUSAT

Porsi alokasi untuk infratraktur, kesehatan, dan pendidikan semakin meningkat. Meskipun, efektivitas dan efisiensi masih harus ditingkatkan



Sumber: Nazara (2017)

Konsep Teoretis Keberlanjutan

- Menurut Alvarado (2003), kebijakan suatu negara sustainable secara fiskal jika membawa situasi di mana suatu negara dapat memenuhi budget constraint. Definisi ini analog dengan perilaku rumah tangga dengan adanya kendala untuk memenuhi budget constraint.

Perbedaan antara *solvency* dan *sustainability*

- Sekumpulan kebijakan tidak *sustainable* apabila membawa kepada *insolvency*. *Solvency* hanya merupakan syarat perlu dari *sustainability*. Karena *solvency* dapat diperoleh dengan biaya yang besar dan penyesuaian yang besar di masa mendatang.
- Sedangkan *sustainability* mensyaratkan dapat mencapai *solvency* tanpa melakukan penyesuaian kebijakan

Perbedaan solvency dan sustainability

- Lihat definisi Sustainability menurut IMF (2002) dan Croce dan Juan Ramon (2003)
- **Borrower is expected to be able to continue servicing its debt Without an unrealistically large Future correction to balance of income and expenditure**

Definisi Sustainability

- Jadi ada dua kondisi yang harus dipenuhi
- (1) suatu negara dapat memenuhi budget constraint-nya tanpa default atau melakukan debt monetization yang berlebihan
- (2) suatu negara tidak terus mengakumulasi utang sementara mengetahui bahwa di masa mendatang dibutuhkan penyesuaian dalam rangka memenuhi utangnya

Definisi Fiscal Sustainability

- Menurut Slack dan Bird (2004), ukuran utama dari fiscal sustainability adalah ukuran defisitnya dan apakah ukuran itu akan membesar atau mengecil di masa mendatang
- Menurut Greene , adalah kemampuan untuk memelihara kebijakan makroekonomi yang ada tanpa adanya ancaman krisis

Definisi Fiscal Sustainability

- Salah satu konsepnya adalah debt to GDP ratio yang konstan. (Barth Richard, 1995; Financial Programming IMF)
- Besar atau kecilnya juga penting yaitu
- Negara dengan **debt ratio yang rendah** tapi **meningkat** lebih buruk dan akan bermasalah dibandingkan negara yang **debt ratio-nya besar** tetapi memiliki kecenderungan **menurun**